

### **BAB III**

## **PEMIKIRAN ANDI MAPPETAHANG FATWA TENTANG INTEGRASI POLITIK DAN ISLAM DI INDONESIA**

### **A. Biografi Andi Mappetahang Fatwa**

A.M. Fatwa telah menjadi ikon perlawanan dan sikap kritis terhadap rezim otoriter Orde Lama dan Orde Baru. Itulah sebabnya sejak muda ia sudah mengalami teror dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh intel-intel kedua rezim otoriter tersebut, hingga keluar masuk rumah sakit dan penjara. Terakhir ia dihukum penjara 18 tahun (dijalani efektif 9 tahun lalu dapat amnesti) dari tuntutan seumur hidup, karena kasus Lembaran Putih Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984 dan khutbah-khutbah politiknya yang kritis terhadap Orde Baru. Jika diakumulasi, ia menghabiskan waktu selama 12 tahun di balik jeruji besi. Atas segala penyiksaan yang dialami, ia merupakan satu-satunya warga negara yang pernah menuntut Pangkobkamtib di pengadilan.<sup>1</sup>

Meski berstatus narapidana bebas bersyarat (1993-1999) dan menjadi staf khusus Menteri Agama Tarmizi Taher dan Quraish Shihab, mantan Sekretaris Kelompok Kerja Petisi 50 itu bersama Amien Rais menggulirkan gerakan reformasi, hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. A.M. Fatwa pernah menjabat beberapa jabatan struktural dan jabatan semi official pada Pemda DKI Jakarta dan Staff Khusus Gubernur Ali Sadikin di bidang politik dan agama. Deklarator sekaligus ketua DPP PAN periode 1998-

---

<sup>1</sup>A.M Fatwa, *Saya menghayati dan Mengamalkan Pancasila Justru Karena Saya Seorang Muslim, Sebuah Skripsi Pembebasan*, Surabaya: PT. Binatu Ilmu, 2002, hlm. 64.

2005 ini pernah menjabat Wakil ketua DPR RI (1999-2004), Wakil Ketua MPR RI (2004-2009), Anggota DPD RI/MPR RI (2009-2014). Saat ini ia menjawab sebagai wakil ketua MPP PAN (2005-sekarang) dan Ketua Badan Kehormatan DPD RI (2012-2014). Pada tanggal 14 Agustus 2008 ia dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana di Istana Negara. Dan pada tanggal 29 Januari 2009 ia memperoleh Award Pejuang Anti Kezaliman dari Pemerintah Republik Islam Iran yang disampaikan oleh Presiden Mahmoud Ahmadinejad di Teheran bersama beberapa tokoh pejuang demokrasi dan kemerdekaan dari sembilan negara. Kepiawaian dalam berdiplomasi membuat A.M. Fatwa beberapa kali dipercaya memimpin delegasi ke sejumlah negara asing, seperti memulihkan hubungan diplomatik dengan China, merintis dibukanya kedutaan RI di Tripoli Libya, serta menjadi kordinator group kerjasama bilateral parlemen RI dan Portugal.

Buah pikirannya telah lahir tidak kurang dari 24 buku, yaitu: Dulu Demi Reformasi, Kini Demi Pembangunan (1985), Demi Sebuah Rezim, Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili (1986, 2000), Saya Menghayati dan Mengamalkan Pancasila Justru Saya Seorang Muslim (1994), Islam dan Negara (1955), Menggugat dari Balik Penjara (1999), Dari Mimbar ke Penjara (1999), Satu Islam Multipartai (2000), Demokrasi Teistis (2001), Otonomi Daerah dan Demokratisasi Bangsa (2003), PAN Mengangkat Harkat dan Martabat Bangsa (2003), Dari Cipinang ke Senayan (2003), Catatan dari Senayan (2004), Problem Kemiskinan, Zakat sebagai Solusi Alternatif (bersama Djamal Doa dan Aries Mufti, 2004), PAN Menyongsong Era Baru, Keharusan Reorientasi (2005),

Pengadilan Ad Hoc HAM Tanjung Priok: Pengungkapan Kebenaran untuk Rekonsiliasi Nasional (2005), Menghadirkan Moderatisme Melawan Terorisme (2006-2007), Satu Dasawarsa Reformasi Antara Harapan dan Kenyataan (2008), Grand Design Penguatan DPD RI: Potret Konstitusi Pasca Amendemen UUD 1945 (2009), Pendidikan Politik Bernegara dengan Landasan Moral dan Etika (2009). Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa Bukan Hak Paten Suatu Golongan (2010). Transisi Demokrasi di Atas Hampan Korupsi: Buah Pikir Reflektif Atas Carut Marut Reformasi (2013). Meretas Jalan Membentuk Karakter (2013).

Atas kreativitas dan produktifitasnya menulis buku, Museum Rekor Indonesia (MURI) memberinya penghargaan sebagai anggota parlemen paling produktif menulis buku, selain penghargaan atas pledoi terpanjang yang ditulisnya di penjara masa Orde Baru. Atas pemikiran dan pengabdianya pada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan luar sekolah, A.M. Fatwa dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada 16 Juni 2009.

A.M. Fatwa juga merintis berdirinya beberapa lembaga pendidikan seperti Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP/Jakarta Islamic School), Yayasan Ki Bagus Hadikusumo, Yayasan Putra Fatahillah dengan sekolah Tinggi Perbankan Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara, dan kini juga Ketua Pembina Yayasan Asrama Pelajar Islam YAPI yang didirikan Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito pada tahun 1952.

## **1. Pendidikan**

- a. Sarjana Muda (BA), IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1963.
- b. Sarjana Muda (BA) Publisistik, Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta, 1964.

- c. S1 Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan Universitas 17 Agustus (Untag), Surabaya/Jakarta 1970.
- d. Kursus Staf dan Kepemimpinan Pegawai Pemda DKI Jakarta, 1975.
- e. Latihan Militer di Sekolah Dasar Perwira K|Omando (Sedaspako) KKO-AL (Marinir), Surabaya, 1966.
- f. Kursus Pelatihan Manajemen di LPPM, Jakarta, 1979/1980.

## **2. Karir**

- a. Imam Tentara, Wakil Kepala Dinas Rohani Islam KKO-AL (Marinir) Komando Wilayah Timur di Surabaya, 1967-1970.
- b. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Masyarakat Direktorat Politik Pemda DKI Jakarta/Staf Khusus untuk masalah-masalah agama dan politik Gubernur Ali Sadikin, 1970-1979.
- c. Staf Khusus Menteri Agama Tarmizi Taher, 1996-1998.
- d. Wakil Ketua DPR RI Periode 1999-2004.
- e. Wakil Ketua MPR RI Periode 2004-2009.
- f. Anggota DPD RI dari DKI Jakarta periode 2009-2014.
- g. Ketua Badan Kehormatan DPD RI Periode 2012-2014.

## **3. Pengalaman Organisasi**

- a. Pelajar Islam Indonesia (PII), sejak 1957, dari tingkat Cabang, dan Pengurus.
- b. Besar, Kini Dewan Penasehat Perhimpunan Keluarga Besar PII.

- c. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sejak 1960, dari Komisariat, Cabang, dan Pengurus Besar. Kini Dewan Penasihat Majelis Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI).
- d. Muhammadiyah, sejak 1959, mulai dari Ranting, Cabang, dan Pimpinan Pusat. Kini Wakil Ketua Lembaga Hikmah Pimpinan Pusat.
- e. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), sejak 1993, mulai dari Penasihat Orsat, Orwil, hingga kini sebagai Dewan Pakar Pengurus.
- f. Front Nasional Pembebasan Irian Barat di Sumbawa, 1958-1959, selanjutnya aktif di Front Nasional Pusat, 1963-1964.
- g. Badan Kerjasama Pemuda Militer (BKSPM) di Sumbawa dan Pusat, 1958-1961.
- h. Badan Kerjasama Ulama Militer (BKS-UM) Jakarta Raya.
- i. Front Pemuda Pusat, 1961-1962.
- j. Ketua Senat Corps Pelajar Calon Perwira ALRI (Corps PT PAL), se-Indonesia, 1962-1963.
- k. Sekretaris Perserikatan Organisasi-Organisasi Pemuda Islam seluruh Indonesia (PORPISI), Organisasi Konfederasi Tingkat Pusat, 1963-1964.
- l. Penandatanganan deklarasi berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), 20 Oktober 1964.
- m. Sekretaris Umum Badan Amal Muslimin, Organisasi konfederasi Ormas-ormas Islam tingkat pusat, 1976-1977. Badan Amal Muslimin adalah mediator dan fasilitator berdirinya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

- n. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, juga anggota Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Pusat 1975-1979.
- o. Penandatanganan Petisi 50, 1980. Sekretaris Kelompok Kerja Petisi 50, 1980-1996.
- p. Dewan Penasihat Alumni IAIN/UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- q. Ketua Umum Koordinasi Dakwah Islam (KODI) DKI 1976-1979.
- r. Ketua II Korps Muballigh Indonesia, pimpinan Sjafruddin Prawiranegara, 1983-1984.
- s. Ketua Korps Muballigh Muhammadiyah DKI, 1977-1999.
- t. Dewan Penasihat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Pusat.
- u. Mendirikan dan memimpin beberapa Yayasan Pendidikan dan Sosial, antara lain Yayasan Putra Fatahillah dan Yayasan Pondok Karya Pembangunan sebagai proyek monumental dari Pemda DKI.
- v. Pendiri dan Deklarator Partai Amanat Nasional tingkat Pusat.
- w. Ketua DPP PAN periode 1998-2005.
- x. Wakil Ketua MPP PAN Periode 2005-sekarang.<sup>2</sup>

## **B. Karya-karyanya Andi Mappetahang Fatwa**

A.M. Fatwa di dunia politik Indonesia menjadi inspirator bagi semua pihak. Ketika menjabat sebagai Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid pernah menyatakan bahwa pendidikan sosial politik yang diberikan A.M. Fatwa sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. A.M. Fatwa tidak saja telah memperaktekan

---

<sup>2</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/A.M. Fatwa](https://id.wikipedia.org/wiki/A.M._Fatwa). Rabu 22 September 2016. 01: 45.

teori politik, tetapi juga kesantunan. Untuk menuangkan ide dan gagasan tentang politik, demokrasi dan kemanusiaan. A.M. Fatwa membentuk pusat kajian “The Fatwa Center”. The Fatwa Center dibentuk sebagai pusat kajian dan amal jariah politik A.M. Fatwa selama ini Idealisme ataupun Konsistensi A.M. Fatwa dalam menyuarkan keadilan tidak saja dikenal di dalam negeri tetapi juga bergaung di dunia Internasional. Tak heran jika tokoh pejuang Muslim ini menerima piagam “Tokoh Anti Kezaliman” yang diserahkan langsung oleh Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad. Piagam juga diserahkan kepada delapan tokoh anti kezaliman dari Afrika Selatan, Irak dan Lebanon. Sikap kritis A.M. Fatwa terkait kehidupan berbangsa dan bernegara di dorong semangat nasionalisme. Tokoh Front Nasional Pembebasan Irian Barat di Sumbawa (1958-1959) ini sempat meminta pemerintah untuk mengganti nama Papua Kembali menjadi Irian Jaya. Menurut A.M. Fatwa, munculnya provinsi papua tidak berdasarkan hasil kesepakatan dengan anggota dewan. Perubahan provinsi Irian Jaya menjadi Provinsi Papua dilakukan di era Presiden Abdurrahman Wahid.<sup>3</sup>

Para ahli sejarah mengungkapkan bahwa kedatangan islam di Indonesia mempunyai ciri yang spesifik yaitu melalui jalur perdagangan dan dengan proses akulturasi kebudayaan secara damai. Spesifikasi itu juga di tandai dengan kemampuan sufistik Islam mengatasi filsafat kejiwaan budha dan hindu yang pada waktu itu telah berkembang tinggi di Jawa. Perkembangan sufistik islam (ilmu tasawuf) pada waktu itu juga mencapai puncaknya dan di jadikan pendekatan mutakhir dalam penyebaran ilmu-ilmu Islam. Jadi, harus kita bayangkan bahwa

---

<sup>3</sup>[www.intelijen.co.id/andi-mappetahang-fatwa-legenda-pengkhtubah-politik](http://www.intelijen.co.id/andi-mappetahang-fatwa-legenda-pengkhtubah-politik). jumat 23 september 2016. 08:15.

Islam yang datang ke Indonesia (Jawa) adalah hasil perkembangan mutakhir sistem Islam pada zamannya. Karena itu, agama Islam merupakan hal baru yang maju sehingga diagumi dan dibutuhkan. Kedatangan Islam itu dengan cepat menumbuhkan kelompok-kelompok masyarakat Islam yang menimbulkan kekaguman-kekaguman karena dinamikanya yang tinggi dalam menghidupkan kekuatan-kekuatan masyarakat. Daerah pesisir utara Jawa cepat berkembang menjadi kawasan perdagangan dan kegiatan masyarakat yang paling dinamis. Dalam perkembangan di kawasan ini, lahirlah sebuah kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu Kerajaan Demak. Ada versi bahwa tahta Demak adalah hasil pembelotan atau hasil perilaku seorang penguasa daerah terhadap pemerintahan pusat di Majapahit. Hanya saja karena pihak Demak menang justru berangsur-angsur tumbuh menjadi pusat kekuasaan yang menenggelamkan kerajaan Majapahit. Sejak timbulnya kerajaan Demak dan seterusnya beralih ke Pajang dan Mataram yang terpecah menjadi Keraton Surakarta dan Yogyakarta, perubahan dan pembangunan masyarakat telah mengarah kepada struktur kekhalifahan Islam, minimal telah terpenuhinya aspek-aspek formal (*kaidah Fiqhiyyah*) untuk mengamalkan "*fardu kifayah filimamah*". Aspek-aspek itu mencuat, antara lain, dalam ciri fisik di seluruh kawasan yang dipengaruhi kesultanan yaitu adanya bangunan Masjid, pendopo pusat pemerintahan dan alun-alun. Bahkan juga sebutan terhadap raja dengan sultan, dan gelar "*Sayyidin Panatagama Kalipatulah*". Dalam hubungan ini, gagasan Imam Al-Marwadi, bahwa "Negara bertugas untuk memelihara agama dan mengatur dunia telah tertampung dengan baik. Ide pembangunan masyarakat bahwa urusan agama menyatu di dalam

urusan Negara yang merupakan ciri struktur masyarakat Islam terus berlangsung dan tidak berubah walaupun oleh kedatangan kolonialisme. Jadi Islam sebagai factor perubahan dan pembangunan masyarakat Indonesia benar-benar real. Dan kalau Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, Ketua Umum ICMI, beberapa waktu lalu pernah mengatakan bahwa secara demografis Indonesia itu adalah Islam, memang hal itu sulit untuk dibantah. Para ulama pembawa Islam ke Indonesia dengan pendekatan sufistik dan fiqhiyah telah mencoba mewarisi sunah Nabi dalam melakukan perubahan dan pembangunan masyarakat yaitu membentuk sebuah sistem yang menyatukan urusan Agama di dalam urusan Negara.<sup>4</sup>

Dunia politik sering dikatakan sebagai dunia kotor, penuh intrik, pertentangan, tipu muslihat, dan lain-lain. Semuanya itu ada benarnya. Tetapi tentang kekotoran dunia politik dan aktivis politik, itu tidak sepenuhnya benar. Yang sepenuhnya benar justru mereka yang tidak mengenal dunia politik, tidak memiliki kesadaran politik, hak-hak politik, dan perjuangan politik, dipastikan akan berada dalam urutan terbawah sebagai pihak penderita (*maf'ul bihi*). Kotor tidaknya politik sangat ditentukan dari segi pemihakan. Apakah artikulasi politik itu berpihak pada suara keadilan dan kebenaran, atau sebaliknya mengarahkannya untuk kezaliman.

Persoalan politik adalah persoalan kehidupan itu sendiri, tak ada batasnya. Semua persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh mekanisme social dan budaya masyarakat, pada saat itulah akan muncul sebagai masalah politik. Persoalan

---

<sup>4</sup>Andi Mappetahang Fatwa, *Agama dan Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997, hlm. 74-76.

sampah di suatu lingkungan umpamanya. Kita tahu, sampah itu persoalan kebersihan atau dalam kacamata fikih Islam mungkin masuk persoalan taharah. Tetapi, sampah bisa berkembang menjadi persoalan politik pada saat mekanisme sosial dan budaya yang ada, tidak mampu menyelesaikannya. Pada saat itu yang jalan haruslah “*political will*”. Contoh lainnya sekarang ini soal minuman keras, pelacuran, perjudian, aliran keagamaan, dan lain-lain. Jika hal-hal sederhana bisa berkembang menjadi masalah politik, apalagi masalah-masalah besar, ide-ide besar yang dimaksud tentu tak terkecuali yang dibawa oleh agama. Misalnya seruan keadilan. Ia mesti dilaksanakan dengan menggunakan sarana-sarana dan metode yang bisa mengantarkan kepada tujuan. Sarana-sarana itu bisa berupa partai, ormas, forum, figur-figur kepemimpinan, media-media (milik pemerintah maupun swasta), organisasi mahasiswa, buruh, profesi, dan lain-lain. Kesemuanya itu adalah perangkat politik modern. Islam, seperti kita ketahui, adalah agama kehidupan. Ia membawa prinsip-prinsip dan ide-ide besar. Bagaimanakah caranya agar prinsip dan ide-ide besar Islam itu dapat diimplementasikan dalam konteks kehidupan kaum muslimin dan bangsa, umpamanya? Di sinilah mulai terbentang jalan politik yang harus dilalui oleh Islam. Tidak cukup dengan cara-cara dakwah konvensional.

### **C. Hubungan Politik dan Islam Menurut Andi Mappetahang Fatwa**

Dalam perkembangan kehidupan kebangsaan, di mana penganut Islam merupakan bagian terbesar bangsa, kita telah mampu mencapai prestasi ijtihadiah

merangkum ide sosial politik ke dalam Pancasila.<sup>5</sup>Kita bisa merumuskan secara sederhana bahwa artikulasi politik itu berkisar pada dua persoalan.Pertama, bagaimana amanat dapat sampai dan ditunaikan dengan benar.Kedua, bagaimana kebenaran dapat ditegakkan dan semua pihak taat pada konstitusi.

Yang pertama (amanat) menyangkut dua manifestasi:

1. Amanat dalam menunjuk, memilih, atau mengangkat pemimpin/pejabat. Ini artikulasi politik yang tidak mudah. Menyampaikan amanat dalam manifestasi mengangkat pemimpin ternyata merupakan lapangan politik yang rawan. Tetapi pada prinsipnya, bagaimana dapat terpilih pemimpin yang cakap dan mampu sekaligus “terbaik” dari segi kepentingan rakyat. Tentu rakyat yang mayoritas. Di sinilah perjuangan politik menghasilkan sistem pemilihan yang baik, jujur, dan adil merupakan ini artikulasi politik yang paling penting.
2. Amanat dalam pengurusan harta Negara dan pemberian perlindungan terhadap kehormatan dan hak-hak warga Negara. Artikulasi politik dalam amanat ini ialah mengembangkan budaya pengawasan dan koreksi. Sebab, setiap penguasa selalu cenderung korup sehingga pengawasan diperlukan, agar mekanisme ini berjalan sebagaimana yang diperlukan, yakni peningkatan kesadaran politik rakyat dan kebebasan berpartisipasi. Maka, menyampaikan amanat dalam manifestasi ini ialah demokratisasi.

Yang kedua (taat pada kebenaran dan konstitusi) juga menyangkut dua manifestasi sasaran:

---

<sup>5</sup>Ibid., hlm. 174-176.

1. Pihak penguasa, diharapkan bertindak sesuai dengan konstitusi, kebenaran, dan keadilan dalam menjalankan pemerintahan. Artikulasi politiknya ialah melangsungkan permusyawaratan dengan rakyat (Q.s. Syura: 38 dan Ali-imran: 159).

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ  
١٥٩

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Perjuangan politik dalam hal ini mengusahakan agar pemerintah wajib patuh kepada sistem musyawarah yang menjamin kebebasan dan persamaan.

2. Pihak warga Negara, diharapkan mematuhi hukum dan perundang-undangan serta menjaga kehormatan pemerintah/kepala Negara dengan cara patuh dan setia pada hal-hal makruf (yang baik dan professional). Rakyat tidak boleh bentrok, terkecuali pemerintah/kepala Negara melanggar konstitusi, hukum, dan moral. Artikulasi politiknya ialah membangun hukum dan politik rakyat dalam rangka persatuan dan kesatuan.

Peran politik Islam pada masa depan sangat bergantung bagaimana umat mampu memberi kualitas pada ruang-ruang artikulasi politik yang kemukakan di atas yang merupakan penjabaran perintah Alquran surah An-Nisa : 58-59.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (4:58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”. (4: 59)

Perjuangan politik umat Islam merupakan suatu kesinambungan secara terus menerus dari generasi satu ke generasi lainnya. Setiap episode sejarah mempunyai tantangan tersendiri dan memerlukan jawaban tersendiri pula. Tetapi, benang merah sejarah umat Islam Indonesia tidak boleh terlupakan, bahwa ia datang dengan damai melalui proses akulturasi budaya rakyat sehingga gerakan Islam tidak bisa lain merupakan gerakan kerakyatan (*populis*). Kedatangan penjajah Belanda dan lainnya telah semakin menegaskan posisi Islam sebagai lambang perlawanan rakyat terhadap penjajahan dan penindasan. Sejarah telah menempatkan Islam berada di tengah-tengah rakyat sehingga benang merah itu tak terhapus. Islam Indonesia selalu bersifat *populis*. Maka setiap kekuatan politik yang menganut kebijakan *populis*, pada saat itu secara otomatis akan disarankan semacam “merangkul Islam”. Sebaliknya, manakala muncul kekuatan *politis* yang menganut kebijakan *feodalistis*, maka pada saat itu akan dirasakan menyusahkan umat Islam. Oleh sebab itu secara garis besar, peran politik Islam yang terbaru adalah bagaimana mendorong kebijakan pembangunan yang mulai *populis* sekarang ini menjadi lebih *populis* lagi. *Orientasi populistis* dalam politik itu tidak

mudah di capai, mengingat pemikiran-pemikiran feodalistis sering lebih menggoda para pemegang kekuasaan. Bahkan seorang Soekarno yang pemimpin populis itu pun tergoda menerapkan kebijakan-kebijakan feodalistis. Sebaliknya juga ada orang-orang dari kalangan feodal yang bertindak *populis*, seperti para pahlawan kita yang menentang penjajah Belanda. Misalnya pangeran Diponegoro atau Cut Nyak Dien, adalah kalangan dari kaum feodal. Tetapi gerakan mereka adalah gerakan *populis*. Begitu pula para kiai dan kebanyakan ulama pesantren, dulunya juga berasal dari jajaran kaum feodal. Mereka terkenal *populis* sebagai pemimpin-pemimpin rakyat setelah menyatu dalam aspirasi masyarakat bawah yang kebanyakan muslim. Hal yang demikian ini juga terjadi pada pergerakan nasional yang dipelopori oleh Budi Utomo yang feodal itu. Akhirnya, semua pergerakan nasional mereka mencair dalam gerakan *populis* yang berpuncak pada gerakan kemerdekaan 1945.

Dengan menyadari posisi Islam yang *populis*, maka tidak bisa lain ruang jelajah ruang perjuangan politik pada masa depan masih tetap berkisar pada bagaimana pemikiran-pemikiran feodal yang masih melekat sistem dan struktur politik bangsa dapat diperbaiki, ditipiskan, atau malah dihilangkan sama sekali. Bagaimana perjuangan politik itu mampu mengikis pikiran-pikiran feodal di kalangan sebagai elit politik kita. Akhirnya secara ringkas saya ingin rumuskan bahwa peran politik umat Islam terbaru adalah bagaimana mendorong pemerintah sekarang lebih menganut kebijakan *populis* sehingga tercipta sistem politik yang adil, terselenggara persamaan harkat di mata hukum dan perundang-undangan.

Kita menyakini, makin adil suatu sistem yang dianut akan makin menguntungkan Islam dan kaum muslimin.<sup>6</sup>

#### **D. Pengaruh Pemikiran Andi Mappetahang Fatwa Bagi Politik Indonesia.**

Berbeda dengan kedatangan agama-agama lain di tanah air, kedatangan Islam memperlihatkan karakternya khas. Selain datang dengan penuh kedamaian, ajaran Islam yang datang tidak melalui fasilitas kekuasaan segera mendapat tempat di kalbu kebanyakan rakyat Indonesia. Kendati demikian, tidak berarti proses bersemayamnya Islam di kalbu bangsa Indonesia berlangsung mulus tanpa sesuatu tantangan. Militerisme Sultan Agung, juga politik Amangkurat I terhadap kaum ulama, selain mengakibatkan kaum bangsawan ke daerah pedalaman dan kesultanan Banten, juga membekaskan ketegangan antara Islam dengan kekuasaan yang nyaris tak terobati. Sikap sultan Agung maupun Amangkurat I itu telah memberi peluang amat besar bagi Belanda untuk melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Dan, situasi inilah yang mendorong kristalisasi ideology Islam pada Sarekat Islam yang lahir pada belah pertama abad XX. Hanya tujuh tahun sesudah Sarekat Dagang Islam (SDI) mengubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI), organisasi ini telah berdiri di berbagai pelosok tanah air, dan menghimpun dua setengah juta anggota. Seperti dicatat Mohammad Hatta, walaupun pada tahun 1912 perkumpulan politik masih-masih di larang oleh undang-undang pemerintah kolonial, SI masih dapat maju dengan cepat dan mengembangkan sayapnya ke seluruh Indonesia. Beratus-ratus ribu rakyat dari segala golongan datang

---

<sup>6</sup>Ibid., hlm. 179-183.

berlindung di bawah panji-panji SI. Ketika kemudian SI terpecah menjadi dua kelompok ideologis yang berbeda sangat tajam, hal itu bukan saja karena pada awal paruh pertama abad XX ideologi komunis mulai masuk ke Indonesia, yang lebih penting, perpecahan itu sesungguhnya merefleksikan stigma sejarah masa lampau bangsa ini sebagai warisan dari politik Sultan Agung dan Amangkurat I. Iktiar menghilangkan stigma sejarah itu sebenarnya telah dilakukan sepanjang masa dan dengan sangat bersungguh-sungguh. Yang paling mencolok ialah yang dilakukan oleh Ir. Sukarno salah seorang kader pemimpin SI, H.O.S.Tjokrominoto. Ketika Sukarno tampil sebagai ideologi nasionalisme, ideology yang dibawakannya itu sungguh berlainan dengan nasionalisme di tempat asalnya yang cenderung memusuhi atau setidaknya tidaknya menafikan agama. Meskipun tetap pada tema dasar nasionalisme tentang perlunya memisahkan agama dan Negara, nasionalisme yang dirumuskan dan dikembangkan Sukarno yang kemudian menjadi nasionalisme Indonesia bersikap menghormati agama. Persoalan-persoalan di sekitar peranan agama dalam kehidupan negara-bangsa itulah yang kemudian menjadi tema perdebatan para pemimpin bangsa di masa lalu. Bukan bagaimana cara “menghalau” agama dari kehidupan negara-bangsa. Hal itu tampak jelas sejak dari polemik antara Sukarno dengan Mohammad Natsir, perdebatan di Badan Penyelidik Usaha-usah Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), hingga ke Majelis Konstituante yang berakhir dengan di keluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Andi Mappetahang Fatwa, *Demokrasi Teistis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,

Sejak awal abad ketujuh belas dapat dikatakan seluruh dunia Islam berada dalam dominasi kekuasaan barat sebagai akibat antara lain perkembangan global umat yang tidak menyenangkan, yaitu situasi kemujudan di bidang intelektual dan situasi mistisme berlebihan bidang spiritual, Kehidupan ekonomi maupun social-budaya. Situasi demikian mengilhami munculnya gerakan *tajdid* (pembaharuan) yang mendorong umat melakukan penelaahan ulang (*musahabah*) tentang kondisi-kondisi mereka. Para tokoh ulama dan pemimpin gerakan pembaharuan menyerukan spirit baru, kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Diyakini keduanya merupakan rujukan yang akan segera memberikan perpecahan dasar-dasar doktrinal dan legitimasi tindakan dan gerakan lebih kuat dan dinamis terhadap kaum muslimin. Dengan Qur'an dan Sunnah, Para pembaru meyakinkan masyarakat Islam dan berusaha mengembalikan kepercayaan mereka sebagai umat yang memiliki harga diri serta sistem ajaran kehidupan yang terbaik. Para pembaharu mencoba menjelaskan kembali doktrin (ajaran) Islam dalam kemasan bahasa dan rumusan pikiran-pikiran modern serta menghubungkannya dengan perkembangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di negeri kita, kawasan nusantara umumnya, gerakan *tajdid* itu dimulai oleh karena pengaruh gerakan Wahabi yang menitik beratkan pada "pemurnian tauhid". Muhammad bin Abdul Wahab sendiri mendapat gelar itu yaitu al-Muwahhid, bapak pemurni tauhid. Di bidang politik, pengaruh awalnya disemangati oleh gerakan Pan-

---

2001, hlm. 139-140.

Islamisme. Gerakan tauhid dan politik dunia Islam, akhirnya mewarnai gerak dan perkembangan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia.<sup>8</sup>

Islam, seperti kita tahu adalah agama kehidupan. Membawa prinsip-prinsip dan ide-ide besar. Bagaimana caranya agar prinsip dan ide-ide besar Islam itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan kaum muslimin dan bangsa, umpamanya, di sinilah mulai terbentang jalan politik yang harus dilalui oleh Islam. Tidak cukup dengan cara-cara dakwah konvensional. Dalam perkembangan kehidupan kebangsaan, di mana penganut Islam merupakan bagian terbesar bangsa, kita telah mampu mencapai prestasi ijtihadiah merangkum ide sosial politik Islam ke dalam Pancasila.<sup>9</sup>

*Founding fathers* dan para pendahulu pemimpin bangsa telah melakukan upaya *state building* dan *nation building* yaitu berkaitan dengan integrasi wilayah, integrasi bangsa, dan juga integrasi nilai dalam ideologi Pancasila. Juga telah dicontohkan bagaimana sikap dan tindakan dalam mewujudkan integrasi elit dan khalayak, serta perilaku integratif. Semua itu dalam ranah integrasi politik. Seiring dengan perjalanan waktu dan dinamika kehidupan bangsa, hal itu mengalami pasang surut dalam perhatian bangsa. Masalah tersebut perlu mendapat perhatian kembali untuk dirawat secara terus-menerus agar apa yang telah dicapai itu dapat terus tegak dan eksis.

Bangsa Indonesia sejak semula telah menerima Pancasila sebagai sistem nilai bersama, sebagai dasar dan ideologi negara dengan pedoman dasar Undang-Undang Dasar 1945. Ironisnya, pada akhir-akhir ini Pancasila kurang mendapat

---

<sup>8</sup>Ibid., hlm. 163-164.

<sup>9</sup>Ibid., hlm. 165.

perhatian, bahkan seolah-olah dilupakan dan kurang nampak dibicarakan dalam ranah publik. Demikian juga di lembaga pendidikan kurang mendapat perhatian, nyaris hanya menjadi pelengkap saja. Oleh karena itu, harus dilakukan *revitalisasi* dan *reaktualisasi* Pancasila. Pengamalan Pancasila harus menyentuh dalam kenyataan hidup sehari-hari. Di lembaga pendidikan harus menjadi pelajaran pokok atau penting, bukan sekedar "nebeng" pada pelajaran tertentu. Apalagi pada saat ini sedang terjadi pertarungan ideologi-ideologi di dunia untuk merebut pengaruh dan pengembangan ideologi, seperti neo-liberalisme, kapitalisme, sosial demokrat, komunisme, dan ideologi yang berbasis agama yang mengusun radikalisme. Dalam integrasi politik dikenal juga ada perilaku integratif. Dalam hal ini dituntut agar setiap warga negara menunjukkan kesediaannya dan siap bekerjasama untuk mencapai tujuan nasional. Adanya perbedaan pendapat, pandangan politik, golongan bahkan dalam persaingan harus bisa bekerjasama untuk mencapai yang lebih besar, yaitu bagi kepentingan bangsa dan negara. Persaudaraan bangsa harus mengalahkan perbedaan-perbedaan termasuk pandangan politik. Para elit politik harus dapat menjadi contoh dalam berperilaku yang menunjukkan sikap toleransi dan sikap resiprositas dalam berdemokrasi dan dalam kancah kehidupan politik.<sup>10</sup>

Jika kita mencermati ideology bangsa yang diletakkan para pendiri bangsa kita, akan diperoleh perspektif yang menunjuk kearah sebuah kultur di mana doktrin tauhid benar-benar hadir sebagai cita-cita luhur kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Perspektif ini telah terumuskan dalam ideology negara Pancasila,

---

<sup>10</sup><http://www.kompasiana.com/amfatwa/merawat-integrasi-politik>. Kamis 22 september 2016. 22:58.

yang mengamatkan kedaulatan rakyat yang berketuhanan (bertauhid) yang bisa disebut: Demokrasi Teistis. Sebagaimana kita ketahui, terbentuknya sebuah filosofi bangsa adalah akumulasi dari nilai-nilai, peristiwa dan pengalaman. Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, yang terkenal dengan pidato lahirnya pancasila, telah berhasil mewakili pikiran-pikiran yang hidup di tengah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan. Karena itu, pidato sukarno langsung mendapat tanggapan dari kalangan Islam untuk disempurnakan. Kita bahkan mencatat bahwa tanggapan itu begitu tinggi semangatnya sehingga argumentasi-argumentasi kalangan Islam waktu itu lebih bersifat *instingtif*, sebagai manifestasi jiwa tauhid.<sup>11</sup>

Sementara itu kehadiran partai politik Islam juga ada dampak positif. Menurut A.M. Fatwa, (A.M Fatwa: Satu Islam Multi Partai, hal. 97-99), aspek positifnya adalah:

1. Rakyat akan semakin terbuka menyalurkan aspirasi politiknya, tanpa intimidasi. Udara kebebasan dan pendidikan politik, lambat laun akan menjadikan rakyat semakin rasional, kritis, dan partisipatif dalam mengikuti segala proses politik yang sedang terjadi.
2. Proses sosial politik akan lebih terbuka dan transparan sehingga budaya penggarapan dan intervensi penguasa kepada segala bentuk mekanisme sosial yang berkembang di masyarakat saat itu menjadi nilai tabu.

---

<sup>11</sup> Andi Mappetahang Fatwa, op., cit. hlm. 244.

3. Umat Islam akan diuntungkan karena ada parpol yang concern memperjuangkan aspirasinya. Yang terjadi kemudian adalah adanya mekanisme pemberdayaan visi politik masyarakat.

Sementara itu, hasil Pemilu 1999, menunjukkan bahwa partai-partai Islam mengalami kegagalan dalam perolehan suara. Hanya PPP, PBB, dan Partai Keadilan yang dapat menembus tujuh besar. Gabungan suara partai-partai Islam pun tidak dapat mengungguli perolehan suara PDI-P sebagai pemegang suara mayoritas. *Depolitisasi* terhadap Islam yang dilakukan rezim Soeharto mungkin menjadi faktor besar yang menyebabkan kecilnya perolehan suara partai Islam. Selain karena perilaku partai Islam yang masih jauh dari ajaran Islam sendiri, menyebabkan umat lebih mempercayakan suaranya kepada partai non Islam, yang nota bene kurang memperjuangkan kepentingan umat Islam. Namun disamping itu, kegagalan tersebut dapat dipandang sebagai *blessing in disguise* bagi para pemimpin politik muslim. Kegagalan tersebut tidak hanya dapat membawa mereka ke dalam perenungan dan introspeksi, tetapi untuk mencari cara-cara guna mengesampingkan perbedaan-perbedaan di antara mereka, dan menciptakan visi kebersamaan (*unified vision*). Disinilah mereka kelihatan semakin menyadari bahwa mereka harus membentuk front politik bersama, jika ingin dan dapat menjadi kekuatan politik efektif dan itu telah terbukti lewat Poros Tengah. Lewat kerjasama apik partai-partai Islam plus (PAN & Golkar), berhasil memecah ketegangan antara pendukung Megawati & Habibie yang makin meruncing, dan menggolkan. Abdurahman Wahid sebagai presiden. Tetapi, meskipun Poros Tengah meski cukup berhasil dalam

menyelamatkan posisi partai-partai yang tergabung di dalamnya, harus diakui bahwa Poros Tengah bukanlah sebuah front atau koalisi yang betul-betul solid dan tangguh. Sebaliknya, bila dilihat pembentukan Poros Tengah merupakan sebuah political expediency, baik secara internal diantara partai-partai Islam maupun secara eksternal menghadapi kekuatan politik lainnya (AM Fatwa: *Satu Islam Multi Partai*, hal. 25).<sup>12</sup>

Pemikiran-pemikiran Andi Mappetahang fatwa tentang Pancasila yang dikemukakan di depan umum, jelas tidak dimaksudkan untuk menghina atau memojokkan seseorang atau beberapa orang figure pejabat, jelas pula tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan figure-figur pejabat tertentu. Pikiran-pikiran Andi Mappetahang fatwa yang dikemukakan didepan umum, di masjid-masjid merupakan langkah yang tepat, yang merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai seorang Mubaligh dan Intelektual. Adalah amanat UUD 1945 sendiri yang menyatakan bahwa tujuan dari kemerdekaan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memang suatu bangsa yang kuat adalah bangsa yang anggota-anggotanya cerdas, sadar politik, dalam arti mengetahui, memahami hak-hak dan kewajiban selaku warga Negara merdeka.<sup>13</sup>

Merombak susunan ketata negaraan kita secara fundamental sebagaimana yang dimaksudkan dalam konsepsi bung karno adalah suatu materi yang diserahkan kepada dewan konstituante pilihan rakyat yang mempunyai

---

<sup>12</sup><http://www.eviandriani.com/2010/09/tantangan-umat-islam-dalam-dunia>. Kamis 23 september 2016. 24 : 28.

<sup>13</sup>Andi Mampetahang Fatwa, *Demi Sebuah Rezim Demokrasi dan keyakinan Beragama diadili*, (Jakarta; PT, gamedia Pustaka, 2000).hlm. 361.

kompetensi dalam hal itu.<sup>14</sup>Pembentukan negara Republik Indonesia adalah sintesa politik yang dilahirkan oleh massa aksi Indonesia, yang dalam jaman lampau didorong oleh seluruh gerakan Indonesia yang cita-citanya ditimbulkan oleh keadaan masyarakat Indonesia dari luar negeri.<sup>15</sup>

Petisi 50 di Era Orba, pada masa aktif sebagai mahasiswa di era tahun 1980 an sejumlah tokoh petisi 50 seperti mantan Perdana Menteri Mohammad Natsir, (Jenderal Purnawirawan) A.H. Nasution, mantan Gubernur Ali Sadikin, AM Fatwa, Darsyaf Rahman, Judil Herry Justam dan masih banyak lagi. Kelompok Petisi 50 muncul saat rezim orde baru (Orba) yang dipimpin Soeharto sedang kuat-kuatnya berkuasa dan amat keras dalam menyikapi para penentangannya. Petisi 50 lahir disebabkan keprihatinan terhadap penyelenggaraan Negara oleh pemerintah Soeharto yang dianggap telah melenceng dari konsitusi dan filosofi Negara, khususnya mantan pejuang 45 itu sudah terbiasa menghadapi tekanan bahkan saat di medan juang mereka mengalami senyatanya peperangan dalam pertempuran jarak pendek meski persenjataan mereka terbatas dibandingkan meriam dan tank-tank serta alat canggih lainnya yang digunakan penjajah Belanda. Dinamakan Petisi 50 karena memang anggotanya terdiri dari 50 orang tokoh mulai dari mantan Perdana Menteri masa kemerdekaan RI dahulu, para mantan jenderal, akademisi dan tokoh mahasiswa. Keberadaan Petisi 50 populer dikalangan aktivis mahasiswa yang pada masa Orba terkekang aspirasi politiknya akibat pemberlakuan NKK BKK yang membatasi ruang gerak sivitas akademika termasuk juga mahasiswa dengan melarang kebebasan mimbar yang

---

<sup>14</sup>H.M Yunan Nasution, *Catatan Perjuangan*, Pustaka Panjimas, Jakarta, hlm. 239.

<sup>15</sup>Prof. Mr. M. Yaman, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, hlm. 25-26.

sebelumnya pernah dinikmati masyarakat kampus. Petisi 50 bisa dikatakan satu-satunya kelompok elite/tokoh bangsa yang berani dan lantang bersuara untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang didominasi dari pandangan-pandangan sang Presiden. Menurut kelompok ini Soeharto telah menafsirkan konstitusi dan filosofi Negara berdasarkan pemahamannya sendiri, sementara Soeharto pun pernah mengungkapkan bahwa Petisi 50 juga merasa paling benar sendiri. Jadi disini terjadi pertarungan pemahaman atas ideologi dan konsitusi Negara oleh para tokoh yang saling berbeda satu sama lain. Sebagai gerakan politik tentu Petisi 50 kerap kali mengadakan rapat-rapat interen namun sering kali rapat-rapat mereka itu terbuka untuk umum meski rapat-rapat mereka dibawah pengawasan aparat keamanan yang berkeliaran diuar gedung rapat. Pada masa itu memang banyak intel-intel pemerintah yang ditugaskan untuk mengikuti setiap gerak gerik politik warga yang dianggap dapat membahayakan Negara dan merongrong kewibawaan pemerintah khususnya Presiden Soeharto. Aparat keamanan yang mengawasi komponen masyarakat yang melakukan aktivitas politik (yang sebenarnya dilarang pemerintah) biasanya bersikap represif dan tidak segan-segan melakukan aksi dan tindakan anarkis kepada warga Negara yang melakukan politik praktis. Sudah banyak mahasiswa kala itu yang di tangkap aparat keamanan. Maka pada masa itu kekuasaan pemerintah amat dominan dibandingkan dengan dua lembaga tinggi Negara lainnya (Yudikatif dan legislatif). Rapat dan pertemuan Petisi 50 kerap dihadiri sejumlah mahasiswa yang berani mengambil resiko diciduk aparat. Sehingga tidak banyak mahasiswa yang berani datang pada acara pertemuan yang diadakan kelompok ini. Sebagai aktivis

mahasiswa kala itu rasa ingin tahu untuk memahami pandangan-pandangan politik para tokoh membuat saya ingin menghadiri sejumlah rapat-rapat politik yang sebenarnya dilarang diadakan di kampus-kampus ataupun diluar kampus. Bahkan saya pernah diajak senior saya sesama aktivis mahasiswa untuk ikut rapat-rapat petisi 50 yang diadakan di berbagai tempat seperti di rumah Ali Sadikin dan restoran di Kebayoran Baru. Para anggota Petisi 50 bukanlah orang sembarangan bahkan Mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta meski tidak menandatangani Petisi 50 yang diajukan ke Pemerintah beliau tampak mendukung kelompok ini dan acapkali juga bertemu dengan para anggota Petisi 50. Saya sangat menikmati berbagai ide, pandangan, pendapat dan gagasan politik para tokoh ini yang demikian bernas dan mencerahkan. Sebagai anak muda saya merasakan betapa “semangat juang 45” yang dimiliki para sesepuh Petisi 50 itu juga telah menginspirasi dan menyemangati saya untuk berorganisasi pada masa mahasiswa dahulu. Para tokoh dan sesepuh Petisi 50 tersebut telah menunjukkan wibawa dan kesederhanaan hidup pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan sesuatu yang amat jarang kita lihat di pentas perpolitikan saat ini di Indonesia. Dalam kesederhanaan mereka tetap memiliki semangat juang tinggi dan komitmen penuh untuk mensejahterakan rakyatnya ketika itu melalui cara berdikari berdiri diatas kaki sendiri. Politik bebas aktif benar-benar dijalankan meski tampak agak kekiri-kirian, namun yang jelas kedaulatan Negara dan bangsa sangat dijunjung tinggi. Pengaruh globalisasi melalui *infiltrasi* budaya asing ke Indonesia berhasil

dicegah oleh para pemimpin bangsa kala itu dengan mengobarkan semangat nasionalisme dan patriotik bangsa.<sup>16</sup>

Dalam kalimat “ *janganlah kalian terpecah belah*” berarti peringatan Allah kepada umat Islam untuk bersatu dalam persaudaraan Islam dan larangan untuk bergolong-golongan yang menyebabkan lemahnya umat Islam dihadapan umat Islam lain. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh banyak golongan non Islam untuk menghancurkan Islam. Dalam al-Qur’an banyak jumpai ayat-ayat yang menerangkan akan pentingnya persatuan ( *ukhuwah Islamiyah* ).<sup>17</sup>

Merujuk pada ketentuan konstitusi itu, fatwa melihat cita-cita aspirasi umat Islam dalam bernegara sudah diberi jalan memadai dalam UUD 1945. Masalahnya tinggal bagaimana kedaulatan rakyat atau demokrasi menurut UUD 1945 dilaksanakan secara wajar, murni, konsekuen, dan sungguh-sungguh bagi umat Islam. Isi dan pelaksanaan itu lebih penting daripada slogan, merek, ataupun cap. Sesuai dengan kondisi objektif umat sekarang itu, cap atau merek “Negara Islam” sering diangkat, bukan dari arus besar umat, melainkan dari riak-riak kecil sejarah masa lalu yang bagi pihak luar Islam diperlukan untuk mendiskreditkan kelompok-kelompok dinamis dalam umat secara politis.<sup>18</sup> landasan atau basis-basis bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik adalah penjaganya. Keduanya mempunyai hubungan erat. Politik tanpa agama bisa

---

<sup>16</sup>[http://old.uin-malang.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4033:belajar-daro-tokoh-jaman-dulu-di-petisi-50&catid=35:artikel&Itemid=210](http://old.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4033:belajar-daro-tokoh-jaman-dulu-di-petisi-50&catid=35:artikel&Itemid=210). Sabtu 24 september 2016. 12:14.

<sup>17</sup>Fatwa menegaskan persatuan bangsa Indonesia harus di bangun dari hati nurani yang tulus serta jauh dari tekanan politik yang pernah terjadi pada masa orde baru, dari luar terlihat bersatu namun sesungguhnya tidak demikian di dalamnya. Wawancara dengan A.M. fatwa pada 8 Juni 2007

<sup>18</sup>A.M. fatwa, *Dari Mimbar ke Penjara: Suara Nurani Pencari Keadilan dan Kebebasan*, Mizan, Bandung , 1999, cet. Ke-2, hlm. 141-143.

hancur, sebaliknya agama tanpa politik dapat hilang dalam kehidupan manusia. Kekuasaan politik atau penguasa penjaga bagi pelaksanaan agama. Negara merupakan organisasi masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Dengan tujuan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Segala program dan kebijakan negara tentunya sangat memerlukan keterlibatan agama dan pemeluk agama, dan sebaliknya dengan adanya negara maka agama akan lebih mudah berkembang. Negara Indonesia secara substantif adalah negara Islami dengan alasan bahwa dalam Pancasila terkandung substansi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti tauhid, kemanusiaan, persaudaraan, demokrasi, dan keadilan, dan agama menempati rating yang tinggi. Selain itu, di Indonesia juga ada jaminan konstitusional, bahwa negara menjamin kemerdekaan warganya untuk beragama dan menjalankan ibadah. Agama juga mendapat pengakuan instrumental dan menjadi landasan spiritual dan moral bagi pembangunan.